

KOLABORASI PEMERINTAH DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN BIREUEN

Muhammad Fathur Syidky

NPP. 32.0030

Asdaf Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: syidky@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ikhbaluddin, S.Kom, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research was motivated by the results of the evaluation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in 2023, where Bireuen Regency obtained an index value of 2.12 and was predicated as sufficient. The index value is relatively low compared to Pidie Jaya Regency, Bener Meriah, and Lhoksemawe City as Regencies/Cities bordering Bireuen Regency. Although in the implementation of SPBE the Bireuen Regency Government has involved third parties to collaborate, in reality the implementation of SPBE has not been optimal in Bireuen Regency. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze how the collaboration process has been running in the Bireuen Regency Government through the Bireuen Regency Communication, Informatics and Cryptography Service in implementing SPBE. **Method:** The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with Diskominsa officials, IT experts, and community representatives, and the study also used documentation to strengthen the research results. Data were analyzed using the concept collaborative governance from Ansell and Gash (2008). **Result:** The results of the study showed that the dimensions of Facilitative Leadership and Institutional Design have not been running well. As for the Initial Condition dimension, there is a gap where the government is more dominant than other actors. While the Collaboration Process dimension has been running well, it's just that the dialogue is carried out by visiting the relevant regional apparatus, and the community is not actively involved. And each digital service application in the Regional Apparatus has not been integrated and managed separately. **Conclusion:** Government collaboration in implementing the Electronic-Based Government System (SPBE) in Bireuen Regency shows that its implementation has not been optimal. The government needs to improve coordination between Regional Apparatus, ensure good system integration, and build commitment from the leadership level to technical implementers so that each party has the same vision in the digital transformation of government. The government also needs to facilitate collaborative forums involving elements of government, academics, the private sector and the community in order to expand participation and innovation.

Keywords: Collaborative Governance, Public Services, SPBE.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi karena hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023, dimana Kabupaten Bireuen memperoleh nilai indeks sebesar 2,12 dan berpredikat cukup. Nilai indeks tersebut tergolong rendah dibandingkan dengan Kabupaten Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Kota Lhoksema sebagai Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bireuen. Meskipun dalam penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Bireuen sudah melibatkan pihak ketiga untuk berkolaborasi, akan tetapi nyatanya dalam penerapan SPBE belum optimal di Kabupaten Bireuen. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses kolaborasi yang telah berjalan di Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen dalam penerapan SPBE. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Diskominsa, tenaga ahli TI, dan perwakilan masyarakat, dan studi juga menggunakan dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian. Data dianalisis menggunakan konsep *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Kepemimpinan Fasilitatif dan Desain Kelembagaan belum berjalan dengan baik. Adapun pada dimensi Kondisi Awal terdapat kesenjangan dimana pemerintah lebih dominan daripada aktor lainnya. Sedangkan pada dimensi Proses Kolaborasi sudah berjalan dengan baik, hanya saja dialog dilaksanakan secara visit ke perangkat daerah terkait, dan masyarakat tidak dilibatkan secara aktif. Serta setiap aplikasi layanan digital di Perangkat Daerah belum terintegrasi dan dikelola secara terpisah. **Kesimpulan:** Kolaborasi pemerintah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum maksimal. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, memastikan integrasi sistem yang baik, dan membangun komitmen dari tingkat pimpinan hingga pelaksana teknis menjadi penting agar setiap pihak memiliki visi yang sama dalam transformasi digital pemerintahan. Pemerintah juga perlu memfasilitasi forum kolaboratif yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, swasta dan masyarakat guna memperluas partisipasi dan inovasi.

Kata kunci: Kolaborasi Pemerintah, Pelayanan Publik, SPBE.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya digitalisasi layanan pemerintah telah mengubah interaksi antara warga negara dan Negara, menawarkan efisiensi dan aksesibilitas yang lebih besar (Figuerola et al., 2025). Pemerintahan yang terbuka, bersih, efektif, dan akuntabel merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mencapainya, pemerintah perlu mengoptimalkan pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi yang dikenal sebagai *e-government* (Wahyudi & Putri, 2024). *E-government* adalah bentuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mampu mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi layanan publik (D. P. Pratama, 2023). Ada juga yang mengatakan bahwa Pemerintahan elektronik atau *e-government* adalah salah satu cara pemerintah untuk mengadopsi keunggulan teknologi komunikasi pada sektor pelayanan publik,

dengan mengadopsi teknologi informasi maka pemerintah idealnya akan semakin mudah memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Model penyampaian yang utama adalah *Government to-Citizen* (G2C), *Government-to-Business* (G2B) dan *Government-to-Government* (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik (Ikhbaluddin & Kawuryan, 2022).

Penerapan *e-government* dirasakan memiliki banyak manfaat bagi warga masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, *e-government* digunakan untuk mengelola data, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas jalur komunikasi. Sebaliknya, bagi pemerintah, penerapan *e-government* dapat meningkatkan produktivitas layanan, memodelkan pengembangan layanan, meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kepada masyarakat (Younus et al., 2025). Melalui penerapan *e-government* telah menciptakan tata kelola pemerintahan baru dengan mengubah pelayanan publik yang selama ini dikenal menghabiskan waktu yang lama, berbelit-belit dan tidak terbuka menjadi lebih terbuka, cepat, dan akuntabel (P. Y. Pratama & Nurmand, 2020).

Menurut Siagian dalam Ikhbaluddin (2021) pelayanan publik merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memberikan jasa-jasa dan kemudahan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut: a. Pelayanan publik berhubungan dengan kegiatan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan haknya, b. Pelayanan yang diberikan berupa barang dan jasa yang vital, c. Adanya prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan penghematan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun telah diatur melalui regulasi nasional seperti Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *E-Government* dan Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penerapan SPBE di daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Kabupaten Bireuen merupakan salah satu daerah dengan hasil evaluasi SPBE memperoleh predikat cukup dengan nilai 2,12 pada tahun 2023, yang menandakan penerapan SPBE belum maksimal dan masih didominasi oleh layanan manual, penggunaan dokumen fisik, serta interaksi tatap muka (Keputusan Menpan RB No. 13 Tahun 2024).

Upaya digitalisasi yang dilakukan pemerintah yang merupakan hasil inovasi Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menghasilkan beberapa aplikasi layanan digital, namun hanya sebagian kecil yang menyentuh langsung kebutuhan pelayanan publik, seperti E-Tubel dan SKM. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan kolaboratif yang lebih kuat dan inklusif, melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan SPBE (Yahya & Sudarmo, 2022). Secara etimologi, kata *collaborative* berasal dari dua kata, yaitu *co* dan *labor*, yang berarti penggabungan tenaga atau peningkatan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kata "kolaborasi" sering digunakan untuk menggambarkan proses penyelesaian pekerjaan yang melibatkan berbagai pihak, melintasi batas sektor, hubungan, atau disiplin (Choirul, 2020).

Adapun *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash adalah sebagai suatu bentuk tata kelola pemerintahan dimana terdapat satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan aktor-aktor *non* pemerintah dalam proses pembuatan atau pelaksanaan kebijakan secara kolektif. Proses ini bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan bersifat konsultatif, dengan tujuan merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik, serta mengelola program atau aset publik (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, 2020). *Collaborative governance* secara umum mengacu pada keterlibatan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan, dalam proses kebijakan tersebut memberikan saran atau melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan dan/atau implementasi kebijakan yang telah ditetapkan bersama (Ambrose et al., 2024). Model *collaborative governance* yang diperkenalkan oleh Ansell dan Gash menjadi relevan dalam konteks ini untuk mengevaluasi dan mendorong efektivitas kolaborasi lintas aktor.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun pemerintah pusat telah menetapkan regulasi terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Bireuen masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini tercermin dari capaian indeks SPBE Kabupaten Bireuen yang pada tahun 2023 hanya memperoleh nilai 2,12 dengan predikat “Cukup”. Capaian tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat lokal. Di sisi lain, upaya digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Bireuen juga belum optimal, yang terlihat dari terbatasnya jumlah aplikasi layanan publik berbasis digital dari 18 aplikasi yang dikembangkan, hanya dua yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan publik. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, ruang lingkup pelayanan publik sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan SPBE di Kabupaten Bireuen juga belum sepenuhnya melibatkan seluruh aktor yang seharusnya berperan, terutama dari sektor masyarakat dan non-pemerintah. Keterlibatan pihak swasta hanya terbatas pada penyediaan tenaga ahli informatika, sedangkan partisipasi masyarakat masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *collaborative governance* yang menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat belum diterapkan secara menyeluruh. Di samping itu, masih minimnya kajian yang menggunakan perspektif *collaborative governance* dalam mengkaji implementasi SPBE di Kabupaten Bireuen mengakibatkan terbatasnya pemahaman terhadap dinamika aktor, proses kolaboratif, dan kendala yang dihadapi dalam tata kelola SPBE secara partisipatif. Padahal, studi sebelumnya di daerah lain seperti Polewali Mandar menunjukkan bahwa kolaborasi lintas aktor menjadi kunci keberhasilan penerapan SPBE. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus menganalisis kesenjangan tersebut melalui pendekatan *collaborative governance* guna memberikan kontribusi teoretis maupun praktis terhadap penguatan implementasi SPBE di tingkat daerah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait kolaborasi pemerintah dengan melibatkan pihak *non* pemerintah maupun antar perangkat

daerah dalam menjalankan berbagai program kerja. Penelitian yang dilakukan Hilmy Yahya dan Sudarmo (2022), penelitian tersebut memiliki fokus tentang model kolaborasi yang dilakukan dan keefektifan *collaborative governance* dalam program EPPSON sebagai perwujudan *smart city* di Kota Surakarta. Sedangkan penelitian yang dilakukan terdapat kesamaan yaitu penelitian kualitatif deskriptif serta perbedaan dengan fokus penelitian pada proses kolaborasi pemerintah dalam penerapan SPBE di Kabupaten Bireuen. Penelitian yang dilakukan Pratama (2023), pada penelitian tersebut berfokus pada penerapan kolaboratif *e-government* dalam pelayanan kepegawaian di BKD Provinsi Sumatera Barat menggunakan teori DeServe (2007). Sedangkan penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan pada metode penelitian dan memiliki perbedaan pada teori dan fokus yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Realiza Meiamaliar R (2022), pada penelitian tersebut berfokus pada kendala kolaborasi untuk mewujudkan interoperabilitas pada aplikasi SIPD. Sedangkan penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan pada metode yang digunakan dan memiliki perbedaan dengan fokus penelitian pada proses kolaborasi pemerintah dalam penerapan SPBE dengan teori Ansell dan Gash, lokus juga menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Triyanto, dkk (2020), pada penelitian tersebut berfokus pada penerapan *collaborative governance* menggunakan teori DeSeve (2007) dalam penerapan e-kes di kabupaten Bengkulu Tengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan pada metode penelitian dan memiliki perbedaan pada teori, lokus yang digunakan, serta fokus pada proses kolaborasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam penerapan SPBE. Penelitian yang dilakukan Maharashtri, dkk (2023), pada penelitian tersebut berfokus pada proses *collaborative governance* menggunakan teori Ansell dan Gash (2008) dalam layanan aspirasi dan penanganan aduan kanal sapa. Sedangkan penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan pada metode penelitian dan teori yang digunakan. Akan tetapi memiliki perbedaan pada lokus yang digunakan, serta fokus penelitian mengenai tentang penerapan SPBE.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam kajian *collaborative governance* dengan fokus pada proses kolaborasi pemerintah daerah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya di Kabupaten Bireuen. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti efektivitas program (Hilmy Yahya & Sudarmo, 2022), penerapan e-government pada aspek kepegawaian (Pratama, 2023), interoperabilitas aplikasi tertentu seperti SIPD (Realiza, 2022), serta layanan pengaduan publik (Maharashtri et al., 2023), penelitian ini secara spesifik menelusuri dinamika kolaborasi lintas aktor pemerintah daerah dalam kerangka penerapan SPBE yang bersifat menyeluruh.

Kebaruan juga ditunjukkan melalui penggunaan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008) dalam konteks penerapan SPBE, yang masih jarang dijadikan fokus utama dalam kajian-kajian sejenis, terutama di daerah tingkat kabupaten. Selain itu, pemilihan Kabupaten Bireuen sebagai lokus penelitian memperkaya literatur karena masih minimnya kajian tentang implementasi SPBE berbasis kolaborasi pada wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan empiris, tetapi juga memperdalam pemahaman

teoretis mengenai bagaimana prinsip-prinsip *collaborative governance* dapat diterapkan dalam konteks digitalisasi pemerintahan di tingkat lokal.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu Untuk mengetahui kolaborasi pemerintah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bireuen.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kolaborasi pemerintah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bireuen. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap proses dan dinamika kolaborasi antar aktor pemerintah dan *non*-pemerintah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan utama dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bireuen (Diskominsa), tenaga ahli Teknologi Informasi dari pihak swasta, serta perwakilan masyarakat. Selain itu, dokumentasi seperti dokumen kebijakan, data aplikasi SPBE, serta laporan evaluasi pemerintah juga digunakan untuk mendukung dan memperkuat temuan.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap paling memahami isu SPBE serta memperluas jaringan informan berdasarkan rekomendasi dari narasumber awal. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat komponen utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Keempat komponen ini digunakan sebagai alat analisis untuk melihat sejauh mana bentuk kolaborasi telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mendukung keberhasilan SPBE.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bireuen (Diskominsa) merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah yang memiliki peran penting dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Dinas ini bertanggung jawab atas pengelolaan teknologi informasi, sistem komunikasi pemerintahan, keamanan data, serta layanan digital yang mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Melihat perkembangan penerapan SPBE di Kabupaten Bireuen saat ini, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam percepatan penerapan SPBE agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bireuen berkolaborasi dengan berbagai instansi baik antar pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, guna meningkatkan efektivitas layanan digital. Untuk mengetahui bagaimana kolaborasi pemerintah dalam pengelolaan SPBE di Kabupaten Bireuen, penulis menggunakan empat dimensi menurut Ansell dan Gash yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi.

3.1 Kondisi Awal

Keterlibatan aktor dalam kolaborasi terdapat keseimbangan relatif dari keterwakilan stakeholder dengan adanya pihak pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat sebagai pengguna. Keterlibatan tiga aktor tersebut memiliki peran dalam proses implementasi kolaborasi. Namun, ada beberapa aspek yang menunjukkan potensi ketidak seimbangan kekuatan, pihak pemerintah melalui Diskominsa memiliki kontrol utama dalam kebijakan dan pelaksanaan SPBE. Sementara itu, pihak ketiga sebagai tenaga ahli lebih bersifat sebagai pendukung teknis yang harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah. Jika merujuk pada teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dalam Qomariah (2023), salah satu prasyarat penting kolaborasi yang efektif adalah adanya *power balance* di antara para aktor. Keseimbangan ini diperlukan agar bisa menghindari kesenjangan dan lancarnya proses kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama.

Selain itu, pada aspek insentif partisipan, pemberian insentif kepada pihak ketiga telah dilakukan secara rutin setiap bulan. Meskipun insentif ini telah dianggarkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran Diskominsa Kabupaten Bireuen, menurut Mirza selaku Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan *E-Government* Diskominsa Kabupaten Bireuen besaran nilai insentif dianggap masih rendah dibandingkan dengan standar jasa tenaga ahli di bidang teknologi informasi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan insentif agar penghargaan yang diberikan seimbang dengan tingkat keahlian yang dibutuhkan dalam kolaborasi.

3.2 Kepemimpinan fasilitatif

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah melalui Diskominsa Kabupaten Bireuen hanya menyediakan ruang kerja apabila dibutuhkan untuk memperlancarkan proses kolaborasi, namun fasilitas lain seperti komputer dan perangkat teknologi lainnya belum memadai. Pihak ketiga yang terlibat dalam kolaborasi implementasi SPBE harus menggunakan perangkat mereka sendiri, dan pola kerja yang diterapkan bersifat fleksibel dan memungkinkan pelaksanaan pekerjaan secara *mobile*. Padahal, jika merujuk pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE disebutkan bahwa penyelenggaraan SPBE harus ditunjang oleh infrastruktur dan fasilitas kerja yang memadai.

Kebijakan pimpinan saat ini juga belum adanya prioritas yang jelas dari Pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap pengesahan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kondisi seperti ini diperlukan pimpinan yang mampu mengajak dan menggerakkan anggota lainnya untuk memprioritaskan penerapan SPBE secara maksimal, serta diperlukan juga pimpinan yang mampu berkoordinasi antar perangkat daerah untuk salin berintegrasi. Hilmy & Sudarmo (2022) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa pemimpin merupakan hal yang vital dalam melakukan sebuah kolaborasi, dimana diperlukan pemimpin yang dapat merangkul, memberdayakan, dan melibatkan pemangku kepentingan demi terwujudnya kesuksesan kolaborasi. Pemimpin kolaboratif juga bertanggung jawab memfasilitasi dan menjaga interaksi yang telah terjalin. Dalam kepemimpinan kolaboratif, keputusan seringkali diambil secara bersama-sama, dan pemimpinnya beroperasi dalam kerangka koalisi, kemitraan, dan aliansi (Nurfadilla & Nurdin, 2024).

3.3 Desain Kelembagaan

Pemerintah daerah dan tenaga ahli sebagai pihak ketiga, telah terlibat aktif dalam kolaborasi ini. Namun, masyarakat masih minim dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga inklusivitas partisipan belum optimal. Selain itu, eksklusivitas forum dengan melibatkan perangkat daerah lainnya yang tergabung dalam tim koordinasi SPBE masih terbatas penyelenggaraannya karena kendala anggaran. Akibatnya, koordinasi lebih sering dilakukan melalui kunjungan langsung ke dinas terkait.

Dari segi aturan dasar, Kabupaten Bireuen telah berpedoman pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Aceh No. 61 Tahun 2021. Aturan ini menjadi landasan hukum dalam penerapan SPBE dan keterlibatan pihak ketiga melalui Surat Keputusan (SK) yang mencakup perjanjian kerja sama serta insentif. Namun, regulasi daerah yang lebih spesifik, seperti Peraturan Bupati masih dalam tahap penyusunan. Aspek transparansi proses, Diskominsa juga telah berupaya membuka akses informasi melalui media *online*, koran, serta *website* resmi pemerintah. Transparansi anggaran juga dilakukan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan. Namun, literasi digital masyarakat masih menjadi kendala utama, di mana sebagian masyarakat lebih memilih metode manual dalam mengakses layanan.

3.4 Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi diawali dengan dialog tatap muka, yang berperan penting dalam menciptakan kepercayaan dan membangun komitmen bersama. Dialog tatap muka menjadi langkah awal untuk menyatukan visi dan memahami kebutuhan serta tujuan dari penerapan SPBE. Penerapan kolaborasi dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Bireuen dimana dialog tatap muka hanya mengandalkan visit secara langsung ke dinas terkait. Adapun dialog tatap muka dalam bentuk forum hanya dilaksanakan sekali saja, dan tidak berkelanjutan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Diskominsa, sehingga mengurangi intensitas pertemuan dan konsistensi koordinasi. Selain itu, masyarakat sebagai pengguna akhir layanan SPBE belum sepenuhnya dilibatkan dalam dialog tatap muka. Partisipasi masyarakat lebih banyak berupa penyampaian aduan atau keluhan terkait penggunaan aplikasi, sementara keterlibatan mereka dalam tahap perencanaan masih minim.

Kepercayaan dengan pihak ketiga dibangun melalui mekanisme formal, seperti penandatanganan nota kesepahaman (MoU) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Diskominsa Nomor 500.12.6/35 Tahun 2024. Penunjukan pihak ketiga sebagai tenaga ahli *software support* memastikan bahwa pembagian tugas dilakukan secara jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak. Komitmen terhadap proses juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan proses kolaborasi. Pemerintah Kabupaten Bireuen menunjukkan komitmennya melalui pembahasan penerapan SPBE dalam rapat koordinasi, dan upaya untuk mendorong digitalisasi layanan publik. Namun terdapat temuan dimana setiap perangkat daerah di Kabupaten Bireuen cenderung mengelola aplikasinya secara mandiri tanpa adanya integrasi yang optimal. Hal ini menjadi hambatan bagi implementasi SPBE yang seharusnya terintegrasi secara menyeluruh. Meskipun demikian, kerja sama dengan pihak

ketiga berjalan dengan baik, ditandai dengan transparansi, saling ketergantungan, dan sikap profesional dari masing-masing pihak.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bireuen masih bersifat parsial. Keterlibatan aktor *non*-pemerintah masih terbatas, terutama pada sektor masyarakat yang belum dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan evaluasi SPBE. Pemerintah Kabupaten Bireuen hanya melibatkan pihak swasta sebagai tenaga ahli teknologi informasi, dengan peran terbatas pada pengembangan teknis sistem dan aplikasi. Sama halnya dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Triyanto et al. (2020) dalam kajiannya tentang e-Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Tengah, penelitian ini juga menemukan bahwa aspek *trust among participants* dan *access to resources* masih belum optimal. Di Kabupaten Bireuen, akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan SPBE juga masih rendah, sehingga menghambat prinsip kolaborasi menyeluruh.

Berbeda dengan temuan Hilmy Yahya dan Sudarmo (2022) yang mengkaji program EPPSON di Kota Surakarta, penelitian mereka menunjukkan bahwa semua aspek *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash telah terpenuhi secara maksimal. Sementara itu, pada penelitian ini, keempat elemen utama *collaborative governance* belum sepenuhnya terimplementasi, terutama dalam aspek desain kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Realiza Meiamaliar (2022) yang menyoroti kendala dalam kolaborasi *e-government* pada aplikasi SIPD di DIY, seperti kesenjangan kekuasaan, lemahnya komunikasi, dan kurangnya kesepahaman tujuan. Penelitian ini juga menunjukkan adanya ketimpangan aktor yang terlibat, dimana aktor pemerintah masih menjadi dominan dalam pengambilan kebijakan SPBE, dan komunikasi lintas aktor belum berjalan efektif.

Temuan ini menolak sebagian hasil dari penelitian Pratama (2023) yang menyatakan bahwa penerapan kolaboratif *e-government* di BKD Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi sembilan elemen kesuksesan kolaborasi. Hal ini karena dalam konteks Kabupaten Bireuen, beberapa elemen seperti *governance*, *network structure*, dan *access to resources* justru menjadi titik lemah dalam implementasi SPBE.

Namun, temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Maharashtri et al. (2023) yang menekankan pentingnya faktor budaya, institusi, dan politik dalam menghambat efektivitas kolaborasi. Dalam konteks Kabupaten Bireuen, rendahnya partisipasi masyarakat bukan hanya disebabkan oleh minimnya kanal kolaborasi, tetapi juga oleh budaya birokratis yang belum sepenuhnya terbuka terhadap partisipasi publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperluas pemahaman tentang penerapan *collaborative governance* pada SPBE di daerah yang belum memiliki kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan SPBE tidak hanya bergantung pada regulasi dan teknologi, tetapi juga pada komitmen, kepercayaan, dan pola relasi yang inklusif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian mengenai kolaborasi pemerintah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini terutama dapat dilihat pada dimensi Kepemimpinan Fasilitatif dan Desain Kelembagaan. Adapun pada dimensi Kondisi Awal terdapat kesenjangan dimana pemerintah lebih dominan daripada aktor lainnya. Sedangkan pada dimensi Proses Kolaborasi sudah berjalan dengan baik, hanya saja dialog dilaksanakan secara visit ke perangkat daerah terkait, dan masyarakat tidak dilibatkan secara aktif. Serta setiap aplikasi layanan digital di perangkat daerah belum terintegrasi dan dikelola secara terpisah. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan SPBE, diperlukan strategi kolaborasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara aktif. Studi ini merekomendasikan peningkatan mekanisme partisipasi masyarakat, penyelenggaraan SPBE yang terintegrasi dan penguatan aturan kelembagaan sebagai langkah penting dalam mendukung keberhasilan SPBE di Kabupaten Bireuen.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing Bapak Ikhsaluddin, S.kom, M.Si., selaku dosen pembimbing serta guru saya selama mendampingi penulis melakukan penelitian karya tulis ini dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih khusus disampaikan kepada pejabat dan staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen yang telah memberikan data dan informasi yang sangat membantu. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para tenaga ahli TI dan perwakilan masyarakat yang telah berperan sebagai informan dalam penelitian ini. Terakhir, penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses penelitian berlangsung. Saya berharap temuan dalam penelitian ini dapat membantu pengambilan kebijakan yang lebih tepat serta strategis dalam kolaborasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kabupaten Bireuen.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ambrose, G., Kim, J., & Siddiki, S. (2024). Evaluating conflict in collaborative environmental governance: A study of environmental justice councils. *Review of Policy Research, March 2024*, 576–606. <https://doi.org/10.1111/ropr.12614>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance: dalam Perspektif Administrasi Publik. In *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik*. Undip Press. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=u73CpVEAAAJ&citation_for_view=u73CpVEAAAJ:_xSYboBqXhAC
- Choirul, S. (2020). Kolaborasi Pemerintahan. In *Dapu6107* (Vol. 1). Universitas Terbuka. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/dapu6107-kolaborasi-pemerintahan/>

- Figuerola, V., Sánchez Crespo, L. E., Santos-Olmo, A., Rosado, D. G., & Fernández-Medina, E. (2025). Building a holistic cybersecurity framework for e-Government based on a systematic analysis of proposals. *International Journal of Information Security*, 24(3). <https://doi.org/10.1007/s10207-025-01024-0>
- Ikhbaluddin, I. (2021). Pelayanan Publik Berbasis Online Di Desa (Studi Pada Empat Desa Di Kecamatan Jatinangor). *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 3(2), 16–30. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v3i2.2309>
- Ikhbaluddin, I., & Kawuryan, M. W. (2022). Information Technology Development (Website) in Supporting Government Communication in Depok City, West Java Province. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 4(1), 50–76. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v4i1.2699>
- Maharashtri, S., Marom, A., & Herbasuki, H. (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Layanan Aspirasi Dan Penanganan Aduan Kanal Sapa Mbak Ita Di Kota Semarang. *Jurnal Tinjauan Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 12(2)(July), 1–23. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/38485>
- Nurfadilla, Y., & Nurdin, I. (2024). Kepemimpinan Kolaboratif dalam Momentum Pemilu 2024 Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(1), 44–49. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3714>
- Pratama, D. P. (2023). Penerapan Kolaboratif E-Government pada Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. 8(2), 205–236. <https://doi.org/10.25077/jakp.8.2.205-236.2023>
- Pratama, P. Y., & Nurmand, A. (2020). Collaborative Governance dan Social Capital : Peran Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam Disaster Management di Daerah Istimewa Yogyakarta. 6(1). <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v6i1.102>
- Qomariah, E. (2023). Collaborative Governance (M. I. Bisri (ed.); 1st ed.). Selaras Media Kreasindo. <https://kubuku.id/detail/collaborative-governance-lengkap/96988>
- Triyanto, D., Efendi, S., & Puspita, V. (2020). Analisis Collaborative Governance Dalam Penerapan Elektronik Kesehatan (E-Kes) Di Kabupaten Bengkulu Tengah. 6, 106–111. DOI: [10.31289/perspektif.v10i1.4264](https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4264)
- Wahyudi, F. A., & Putri, N. E. (2024). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. 06(01), 1–14. DOI: <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.185>
- Yahya, H., & Sudarmo. (2022). Collaborative Governance dalam Program “ EPPSON ” Sebagai Perwujudan Smart City di Kota Surakarta. 2, 239–253. <https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/view/63278>
- Younus, M., Purnomo, E. P., Nurmandi, A., Mutiarin, D., Manaf, H. A., Mumtaz, F., & Khairunnisa, T. (2025). Analyzing the trend of government support for cloud computing usage in e-government architecture. *Journal of Cloud Computing*, 14(1). <https://doi.org/10.1186/s13677-025-00735-y>